Asian Journal of Environment, History and Heritage
September 2017, Vol. 1, Issue. 1, p. 229-240
ISSN 2590-4213 (Print) 2590-4310 (Online)
Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,
Institute of the Malay World and Civilization

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN PROPINSI MAMUJU UTARA SULAWESI BARAT

(ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT POLICY OF EDUCATION DEPATMENT OF NORTH MAMUJU, PROVINCE OF WEST SULAWESI)

Badaruddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan Mamuju Utara. Penelitian ini dilakukan di SKPD Dinas Pendidikan sebagai pengguna keuangan sebagai pengguna keuangan resmi oleh jumlah penduduk sebanyak 85 orang sebagai pengguna kebijakan dan mengumpulkan 81 orang dengan kuota sampling. Dalam menganalisa kualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, variabel yang dianalisis adalah indikator implementasi kebijakan setiap kali kebijakan dibuat mengenai pengorganisasian, penguasaan, pengendalian. Ketiga indikator implementasi kebijakan tersebut digunakan untuk menganalisis fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan administrasi keuangan, pelaporan dan tanggung jawab keuangan, dan pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, faktor yang dominan adalah memahami sinkronisasi dan sinkronisasi konten, sumber daya manusia, fasilitas, pendidikan dan pelatihan, wewenang, koordinasi dan komunikasi, dan lingkungan kebijakan. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahawa secara umum tingkat atau kualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di dinas pendidikan telah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor dominan yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan adalah kebijakan itu sendiri, capasitas departemen dan faktor lingkungan kebijakan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Mamuju Utara.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstract

This research aims at analyzing level of quality the implementation of Regional Financial management policy and analyzing factors affecting the effectiveness the implementation of Regional Financial Management Policy at Education Department of North Mamuju. This research was conducted at SKPD of Education Department as financial user as authorized financial user by number populations were 85 people as policy users and drawn 81 people by quota sampling. In analyzing the quality of the implementation Regional Financial management policy, variable analyzed were indicator of policy implementation whenever the policy has been made regarding to organizing, leading, controlling. The three indicators of policy implementation were used to analyzed the function of regional financial

management which covered planning and budgeting, implementation and financial administration, reporting and financial responsibility, and supervision and regional financial inspection. In analyzing factors affecting the effectiveness the implementation regional financial management policy, the dominan factors are understanding the content and policy syncrhronization, human resources, facilities, education and training, authority, coordination and communication, and policy environment. The analysis used was descriptive qualitative. The study result shows that generally level or quality the implementation of Regional financial management policy at education department has well conducted. While the dominant factors influencing the effectiveness the implementation of policy are the policy itself, capasity of departments and policy environment factor. The three factors have significant influences to the effectiveness of the implementation of regional financial management policy at education Department of North Mamuju.

Keywords: *Policy Implementation of Regional Financial Management, Effectivity of Regional Financial Management*

PENDAHULUAN

Kebijakan pengelolaan kewangan sebagai kebijakan publik harus diimplementasikan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara, harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Halim dan Damayanti (2007:206) mengemukakan bahawa: "konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program-program pebangunan.

Berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan daerah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerapkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban dan pemeriksaan keuangan daerah.Kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan yang harus dijalankan, dan kebijakan yang sifatnya regulasi bersifat top down, bahkan bersifat memaksa, karena kebijakan ini harus dipedomani dalam pengelolaan keuangan daerah. Riant Nugroho (2006:143) menegaskan pendapatnya sebagai berikut: "Kebijakan public-sejak formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah-kaidah karena kaidah tersebut memang bersifat given atau tidak dapat ditolak. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi .Oleh karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri ".

Pelaksanaan kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah konflik keputusan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dalam pelakksanaan kebijakan ini selain pemahaman terhadap isi kebijakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaannya, tetapi lebih penting juga diperhatikan adalah etika birokrasi pelakksana kebijakan.

Udoji dalam Irfan (2006:31) menyatakan bahawa :*"The execution of policies is an important if not more than policy-making.Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented"*.Hal ini berarti bahawa pelakksanaan kebijakan adalah sesuatu yang paling penting, bahkan mungkin yang jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dengan demikian, apabila perubahan kebijakan tidak memberi dampak pada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka implementasi kebijakan dimaksud tidak akan mencapai efektivitas yang diharapkan yaitu terciptanya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Namun di sisi lain implementasi kebijakan baru tentang pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki tingkat efektifitas tertentu untuk meminimalkan bentuk penyalahgunaan keuangan dan Pratik malladministrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen dimaksud dikemukakan oleh Riant Nugroho (2006:144), bahawa:

> Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka organizing-leading- controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.Secara rinci kegiatan manajemen implementasi kebijakan dapat disusun berurutan sebagai berikut, yaitu implementasi strategi (pra implementasi), pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan dan pengendalian.

Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana kualitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah setelah diterapkannya kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PendidikanKabupaten Mamuju Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan public menurut Tangkilisan (2006:3) merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Pendapat senada dikemukakan oleh Anderson dalam Tangkilisan (2006:3) yang menyatakan bahawa: ublic policies are those policies developed by governmental bodies and official." Pendapat tersebut mengandung makna bahawa:

a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
c. Kebijakan itu, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu;
d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan;
e. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilanndaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Thomas R. Dye (1995:3) mendefinisikn kebijakan sebagai: *"is whatever governments choose to or not to do"*. Dunn (1995) merumuskan bahawa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan, termasuk keputusan untuk tidak berbuat yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah.

Sedangkan pengertian implementasi menurut Hazirwan (2008) adalah bahawa secara sederhana implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain implementasi merupakan proses penerjemahan kebijakan (policy statement) ke dalam aksi kebijakan (policy acion).

Bertolak pada teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2006:152) maka pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam kerangka manajemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling.Hal imi mengandung makna bahawa ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas

selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pijakan teori tersebut dapat disimpulkan bahawa variable kunci atau indicator dari implementasi kebijakan adalah:

a. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan (organizing);
b. Melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan kebijakan (leading);
c. Melaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan (controlling)

Model Implementasi Kebijakan

a. Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), mengandaikan bahawa implementasi kebijakan berjalan linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan. Variabel yang mempengaruhi kebijakan public menuurut model ini adalah: 1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2) karakteristik dari agen pelaksana atau implementor, 3) kondisi ekonomi, sosial dan politik, 4) kecenderungan (disposition) dari pelaksana atau implementor. Karakteristik model yang dikemukakan oleh Meter dan Horn ini mengemukakan model puncak ke bawah atau lebih berada pada mekanisme paksa dari pada mekanisme pasar.

b. Model Implementasi Grindle
Model implementasi Grindle (1980) yang dikutip oleh Riant Nugroho (2006:132) yang mengemukakan bahawa model kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahawa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Lebih lanjut Grindle mengemukakan bahawa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan tersebut. Isi kebijakan itu mencakup 1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) kedudukan pembuat kebijakan, 5) siapa pelaksana program, 6) sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga penguasa, 3) kepatuhan dan daya tanggap.

c. Model Implementasi Donald Mazmanian dan Paul A. Sebastier

Menurut Model Mazmanian dan Sebastier dalam Riant Nugroho (2006:131) bahawa implementasi kebijakan diperlukan sepuluh syarat sebagai berikut:

> *Pertama, berkenaan dengan jaminan bahawa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.Ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan bear-benar ada. Keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, karena asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki kebijakan tersebut dapat dicapai.Sebuah kebijakan yang mempunyai hunungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.Keenam, apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Kedelapan, bahawa tugas-tugas yang telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Kesembilan, adlah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi. Kesepuluh, adalah bahawa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan tetap berupa kebijakan-tanpa ada impact bagi target kebijakan.*

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Fungsi anggaran dalam pengelolaan kewangan daerah sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi otorisasi, yaitu mengandung arti bahawa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahawa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahawa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

d. Fungsi alokasi, mengandung arti bahawa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

e. Fungsi distribusi, mengandung arti bahawa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

f. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahawa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan atau pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan substansi pengelolaan keuangan daerah yang diadopsi dari fungsi manajemen, yaitu:

a. Perencanaan dan Penganggaran

   Dalam proses perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh World Bank, dalam Buku Public Expenditure Management Handbook (1998), yang mengemukakan prinsip=pronsip penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: 1) prinsip akuntabilitas, 2) prinsip value of maoney, 3) prinsip kejujuran, 4) prinsip transparansi, 5) prinsip pengendalian

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

   Pelaksanaan anggaran didahului oleh penetapan anggaran antara Pemerintah Daerah dan DPRD kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA-SKPD. Kepala Satuan Kerja Perangat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk melaksanakan dan menatausahakan anggaran.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

   Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara wajib dilakukan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah

adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Komponen laporan keuangan meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Neraca, 3) Laporan Arus Kas dan, 4) Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)

d. Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.Pengawasan dan pemerikasaan dilakukan oleh aparat pemeriksan keuangan baik internal maupun eksternal. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi, yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEWANGAN DAERAH

Menurut Devas, Tangkilisan (2004:242) bahawa efektifitas adalah adalah hubungan antara *output* dan tujuan dan dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* kebijakan dan prosedur suatu institusi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan.Sesuatu dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah maka pengelolaan keuangan daerah diimplemmentasikan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: 1) prinsip tertib, 2) prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, 3) prinsip efektivitas, 4) prinsip efisiensi, 5) prinsip ekonomis, 6) prinsip transparansi, 7) prinsip bertanggung jawab, 8)prinsip keadilan, 9) prinsip kepatutan dan 10) prinsip manfaat untuk masyarakat.\

Lebih lanjut Devas dalam Tangkilisan (2004:243), mengemukakan bahawa factor penentu efektivitas suatu program meliputi:

a. Faktor siumberdaya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja, serta dana/keuangan;

b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu structural maupun fungsional;

c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan;

d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksananya baik pimpinan maupun masyarakat;

e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan faktor-faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran dimaksud.

KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pikir menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variable. Variabel dimaksud meliputi variable implementasi kebijakan pengelolaan kewangan daerah. Dalam penelitian ini panalitia akan meneliti tingkat atau kualitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Variabel selanjutnya adalah variable efektivitas pengelolaan kewangan

daerah. Dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa factor utama antara lain factor kebijakan itu sendiri, factor kapasitas kelembagaan dan factor lingkungan kebijakan.

Pertautan anatara variable tersebut digambarkan sebagai berikut:

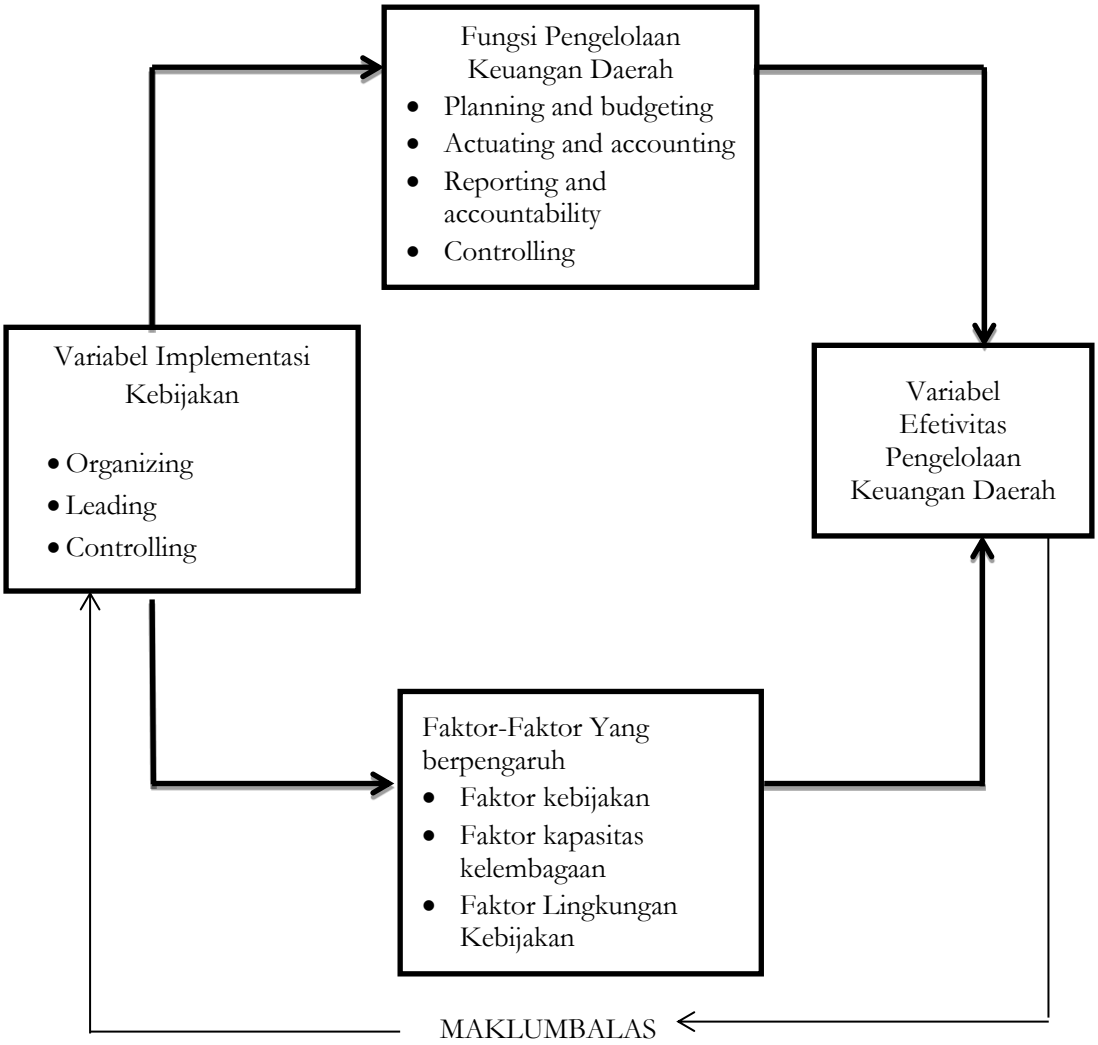

METODE PENELITIAN

Metode dan Jenis Penelitian

Metode dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kualitas implementasi kebijakan pengelolaan kewangan daerah dan gambaran tentang factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten mamuju Utara.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada salah satu SKPD yang menerapkan kebijakan pengelolaan kewangan daerah, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.Penelitian dilaksanakan selama empat bulan atau sekitar 120 hari.

Polpulasi dan Sampel

Polpulasi adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang dapat digeneralisiasi (Arikunto, 1997). Sehubungan dengan penelitian ini maka polpulasi adalah seluruh pelaku kebijakan yang merupakan pegawai pada Dinas pendidikan Kabupaten Mamuju Utara, mulai dari level pimpinan (eselon II) sampai pada staf pengelola keuangan yang secara keseluruhan berjumlah 85 orang.

Pemilihan sampel dipilih secara kuota sampling. Menurut Sugiono (2006:95) kuota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang dinginkan. Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menginginkan jumlah sampel yang diteliti sebesar 95% dari jumlah populasi dengan derajat kepercayaan 95%.Dengan demikian maka jumlah sampel adalah sebesar 80.75 atau dibulatkan menjadi 81 orang.

PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi.Kuesioner yang digunakan unruk mengumpulkan data tentang tingkat atau kualitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta factor factor yang mempengaruhi efektifitas imlpementasi kebijakan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.Kuesioner menggunakan skala likert.

Pengolahan dan analisis data menggunakan jadual frekuensi atau jadual prosentase dan jadual kontinum.

Implementasi Kebijakan Pengorganisasian (organizing) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperoleh dengan meminta tanggapan responden tentang Kualitas Implementasi kebijakan pengorganisasian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Jadual 1. Tanggapan responden tentang kualitas implementasi kebijakan pengorganisiaisian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

No	Tanggapan Responden	Bobot	Nilai Yang diharapkan	Frekuensi (f)	Skor	Prosentase (%)
1	Sangat Baik	4	263.26 – 324	29	116	35.80
2	Baik	3	202.51 – 263.25	43	129	53.09
3	Kurang Baik	2	141.76 – 202.50	8	16	9.88
4	Tidak Baik	1	81.00 – 141.75	1	1	1.23
		Jumlah		81	262	100

Berdasarkan Jadual 1 di atas dapat diketahui bahawa dari 81 responden, terdapat 29 orang atau 35.80% yang berpendapat bahawa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada kebijakan-kebijakan pengorganisasi dalam penyusunan rencana sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Terdapat 43 orang atau 53.09 % berpendapat sudah dilaksanakan dengan baik. Sementara itu terdapat 8 orang atau 9.88% berpendapat kurang terlaksana dengan baik dan 1 responden atau 1.23% berpendapat implementasi kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Jadual 1 di atas maka tingkat implementasi kebijakan pengorganisasian dalam pelaksananan perencanaan dan penganggaran adalah 262/324 x 100% = 80.86 %. Jadi tingkat implementasinya mencapai 80.86%. Nilai 262 adalah skor perolehan dan 324 adalah skor yang diharapkan atau skor total.

Tingkat atau kualitas implementasi kebijakan tersebut digambarkan dalam tabel kontinum sebagai berikut (Rujuk Gambar 1):

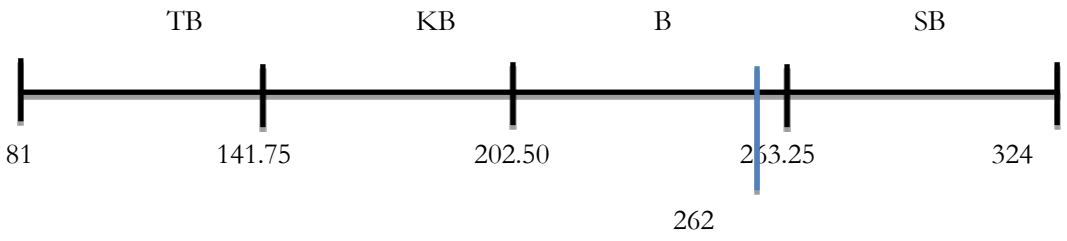

Gambar 1. Garis Kontinum dari Jadual 1

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa tingkat kualitas implementasi kebijakan baik, karena nilai perolehan 262 berada pada garis kontinum pada interval 202.50 – 263.25 artinya baik (B) yang ditunjukkan dengan angka 80.86% pada jadual persentase.

1. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kepemimpinan (*Leading*) dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

   Kualitas Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperoleh dengan meminta tanggapan responden tentang Kualitas Implementasi kebijakan kepemimpinan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Jadual 2. Tanggapan responden tentang kualitas implementasi kebijakan pelaksanaan kepemimpinan (*leading*) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

No	Tanggapan Responden	Bobot	Nilai Yang diharapkan	Frekuensi (f)	Skor	Prosentase (%)
1	Sangat Baik	4	263.26 – 324	11	44	13.58
2	Baik	3	202.51 – 263.25	61	183	75.31
3	Kurang Baik	2	141.76 – 202.50	9	18	11.11
4	Tidak Baik	1	81.00 – 141.75	0	0	0
		Jumlah		81	245	100

Berdasarkan Jadual 2 di atas dapat diketahui bahawa dari 81 responden, terdapat 11 orang atau 13.58% yang berpendapat bahawa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada kebijakan kebijakan kepemimpinan dalam penyusunan rencana sudah dilaksanakan dengan sangat baik.Terdapat 61 orang atau 75.31 % berpendapat sudah dilaksanakan dengan baik. Sementara itu terdapat 9 orang atau 11,11% berpendapat kurang terlaksana dengan baik dan tidak ada responden atau 0% berpendapat implementasi kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Jadual tersebut maka tingkat implementasi kebijakan kepemimpinan dalam pelaksananan perencanaan dan penganggaran adalah 245/324 x 100% = 75.61 %. Jadi tingkat implementasinya mencapai 75.61%. Nilai 245 adalah skor perolehan dan 324 adalah skor yang diharapkan atau skor total.

Tingkat atau kualitas implementasi kebijakan tersebut digambarkan dalam table kontinum sebagai berikut (Rujuk Gambar 2):

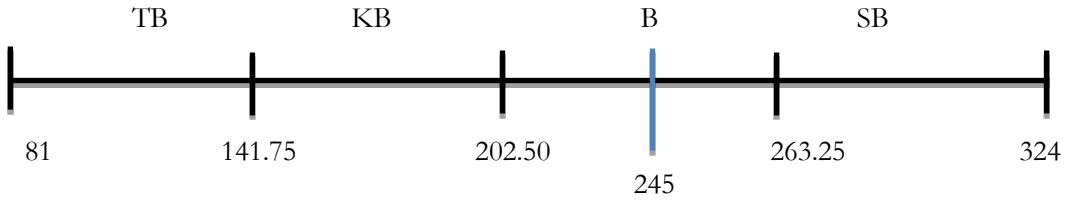

Gambar 2. Garis Kontinum dari Jadual 2

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa tingkat kualitas implementasi kebijakan sangat baik, karena skor perolehan 245 berada pada garis kontinum pada interval 202.50 – 263.25 artinya baik (B) yang ditunjukkan dengan angka 76.61% pada jadual persentase.

2. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (*Controlling*) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Kualitas Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperoleh dengan meminta tanggapan responden tentang Kualitas Implementasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kebijakan (*controlling*) dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Jadual 3. Tanggapan responden tentang kualitas implementasi kebijakan pengendlian pelaksanaan kebijakan (*controlling*) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

No	Tanggapan Responden	Bobot	Nilai Yang diharapkan	Frekuensi (f)	Skor	Prosentase (%)
1	Sangat Baik	4	263.26 - 324	30	120	37.04
2	Baik	3	202.51 – 263.25	50	150	61.73
3	Kurang Baik	2	141.76 – 202.50	1	2	11.23
4	Tidak Baik	1	81.00 – 141.75	0	0	0
		Jumlah		81	272	100

Berdasarkan Jadual 3 di atas dapat diketahui bahawa dari 81 responden, terdapat 30 orang atau 37.04% yang berpendapat bahawa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada kebijakan pengendalian pelaksanaan kebijakan (controlling) dalam penyusunan rencana sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Terdapat 50 orang atau 61.73% berpendapat sudah dilaksanakan dengan baik. Sementara itu terdapat 2 orang atau 11.23% berpendapat kurang terlaksana dengan baik dan tidak ada responden atau 0% berpendapat implementasi kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan jadual tersebut maka tingkat implementasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kebijakan (*controlling*) dalam pelaksananan perencanaan dan penganggaran adalah 272/324 x 100% = 83.95 %. Jadi tingkat implementasinya mencapai 83.95%. Nilai 272 adalah skor perolehan dan 324 adalah skor yang diharapkan atau skor total.

Tingkat atau kualitas implementasi kebijakan tersebut digambarkan dalam garis kontinum sebagai berikut (Rujuk Gambar 3):

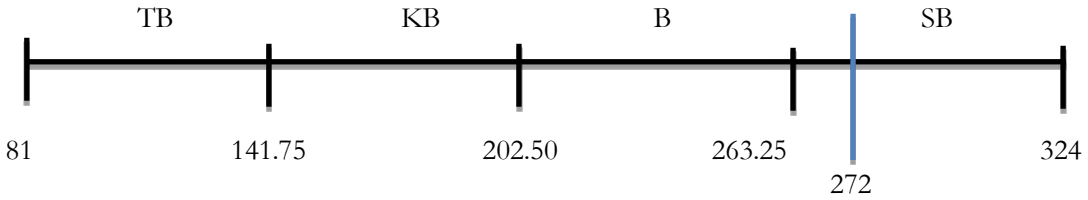

Gambar 3. Garis Kontinum dari Jadual 3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa tingkat kualitas implementasi kebijakan sangat baik, karena skor perolehan 272 berada pada garis kontinum pada interval 263.25 – 324 artinya sangat baik (SB) yang ditunjukkan dengan angka 83.95 5% pada tabel persentase.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEWANGAN DAERAH

1. Faktor Isi Kebijakan
2. Faktor Sinkronisasi Kebijakan
3. Faktor SDM Pengelola Keuangan
4. Faktor Sarana dan Prasarana
5. Faktor Pendidikan dan Pelatihan
6. Faktor Kewenangan (otoritas)
7. Faktor Koordinasi dan komunikasi
8. Faktor lingkungan kebijakan

Jadual 4. Perhitungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terhadap efektvitas implementasi kebijakan PKD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara

	Kategori jawaban berdasarkan skala likert									
	SB		B		KB		TB		Total	
Faktor Yang berpengaruh	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Faktor Kebijakan										
• Isi Kebijakan	56	69.14	23	28.4	2	2.47	0	0	81	100
• Sinkronisasi Kebijakan	35	43.21	32	39.51	12	14.8	2	2.47	81	100
Faktor Kapasitas Kelembagaan										
• SDM	55	67.9	26	32.1	0	0	0	0	81	100
• Sapras	43	53.09	34	41.98	4	4.94	0	0	81	100
• Diklat	54	66.67	24	29.63	2	2.47	1	1.23	81	100
• Otoritas	39	48.15	41	50.62	1	1.23	0	0	81	100
• Koordinasi dan Komunikasi	38	46.91	37	45.68	6	7.41	0	0	81	100
Faktor Lingkungan Kebijakan										
• Lingkungan Masyarakat (target kebijakan)	43	53.09	26	32.1	11	13.6	1	1.23	81	100

Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan bahawa factor pemahaman isi kebijakan menunjukkan 56 orang dari 81 responden atau 69.14 % berpendapat bahawa

implementasi kebijakan akan sulit dilaksanakan jika pelaku kebijakan tidak memahami isi kebijakan yang akan dilaksanakan, dan 23 responden atau 28.4% yang berpendapat bahawa factor sinkronisasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan kualitas yang sangat baik dan kualitas baik. Hal ini berarti bahawa pelaku kebijakan atau aparatur pada Dinas pendidikan sudah memahami dan memiliki tingkat pengauasaan yang baik terhadap isi kebijakan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, ditinjau dari kebijakan pengorganisasi kebijakan, pelaksanaan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.

Faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara, yaitu dominan adalah factor kebijakan itu sendiri, faktor kapasitas kelembagaan dan factor lingkungan kebijakan. Ketiga factor tersebut memiliki pengaruh yang sangat tinggi atau sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Arinya semakinn tinggi pemahaman para pelaku kebijakan atau aparatur terhadap isi atau subtansi kebijakan maka akan semakin efektif pelaksanaan atau implementasi kebijakan itu dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

RUJUKAN

Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Penerbit Bina Aksara.

Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Second Edition. New Jersey. Prentice Hall.Inc.Company Englewood Cliffs.

Dye, Thomas R. 1995.*Understanding Public Policy*. New Jersey. Prentice Hall.

Grindle, Merikee S. 1980. *Politics and Policy In The Third World. Princeton*, NJ: Princeton University Press.

Halim, Abdul & Damayanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP-STIM YPKN.

Hazirwan. 2008. *Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tesis)*.PPS UGM Yogyakarta.

Irfan. 2006. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Donggala (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Donggala) (Tesis)*.PPS UNTAD Palu.

Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara berkembang, Model Perumusan, Implemntasi dan Evaluasi.* Jakarta: Penerbit Alex Media Komputindo.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi.S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*.Yogyakarta. Penerbit Lukman Offset

Tangkilisan, Hessel Nogi.S. 2006. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*.Yogyakarta. Penerbit Lukman Offset

Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. 1975. The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society* 6(4): 445-488.

World Bank. 1998. *Public Expenditure management Handbook*. Washington DC. World Bank.

Badaruddin S.Si, M.Si.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako (UNTAD)
Sulawesi Tengah, Indonesia
Email: badarudin580@gmail.com